

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Abu Daud Busroh. 1993. *Pemeriksaan Keuangan Negara*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Agung Suseno. 2010. *Eksistensi BPKP Dalam Pengawasan Keuangan dan Pembangunan*. Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi. Vol.17 No.1. Pasca Sarjana Ilmu Administrasi FISIP UI. Depok.
- Aminuddin Ilmar. 2013. *Hukum Tata Pemerintahan*. identitas Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Fajlurrahman Jurdi. 2016. *Teori Negara Hukum*. setara press. Malang.
- Muh. Hasrul. Fajlurrahman Jurdi dan Ahmad Yani. 2019. *Hukum Kelembagaan Negara*. Litera. Yogyakarta
- Jimly Asshidiqie. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Jonaedi Efendi. Johny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Normatif dan Empiri*. Prenadamedia Group. Depok.
- Kaligis. 2012. *Kerugian Negara Dalam Kasus Korupsi BPK vs BPKP*. PT. Yarsif Watampone.
- Mukti Fajar. Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Muh. Hasrul. Syafa'at Anugrah Pradana. 2019. *Urgensi Staf Ahli Kepala Daerah*. Litera. Yogyakarta.
- M. Afifuddin. 2020. *Membumikan Pengawasan Pemilu*. PT Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Muh. Hasrul. Fajlurrahman Jurdi dan Ahmad Yani. 2019. *Hukum Kelembagaan Negara*. Litera. Yogyakarta
- Nurul Qamar. Amiruddin.Salle.Dkk. 2018. *Negara Hukum dan Negara Kekuasaan*. CV. Sosial Politik Genius. Makassar.
- Sarbudin Pajaitan. 2018. *Auditor Dalam Perkara Korupsi Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan*. CV. Budi Utama. Yogyakarta.
- Shita Mariza. *Fungsi Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Dalam Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Pendidikan Kota Makassar*. (Universitas Hasanuddin 2019)

Sigit Angger Pramukti. 2018. *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*. Media Pressindo. Yogyakarta.

Sujanto. 1996. *Aspek-Aspek Pengawasan Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.

Sutedi Adrian. 2010. *Hukum Keuangan Negara*. Sinar Grafika. Jakarta.

Titik Triwulan. 2016. *Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. PT Fajar Interpratama Mandiri. Jakarta.

Vistor M.Sitomorang. Jusuf Juhir. 1994. *Aspek hukum pengawasan melekat dalam lingkungan aparatur pemerintahan*. Rineka cipta.

SKRIPSI:

Akbar. 2019. "*Fungsi Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Dalam Perhitungan Kerugian Negara Tindak Pidana Korupsi*". Skripsi . Sarjana Hukum. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar.

Moh. Hasyim. "Pengawasan Kekuasaan Eksekutif Dalam Negara Hukum Pancasila". Jurnal Hukum. Fakultas Hukum Ugm Yogyakarta. Vol. 3, Nomor 6 1996.

Rahmatika Amanda. 2008. Pengaruh Skeptisme Professional. Kepatuhan Pada Kode Etik Dan Independensi Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Pada BPKP Perwakilan Sumatera Utara). Skripsi. Sarjana Akuntansi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

KEPUTUSAN, PERATURAN DAN UU

keputusan presiden nomor 103 tahun 2001

peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008.

keputusan presiden nomor 103 tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi kewenangan, susunan organisasi dan tata letak kerja lembaga non departemen.


peraturan presiden nomor 192 tahun 2014.

putusan mahkamah konstitusi (MK) nomor 31/PUU/X/2012.

Undang-undang nomor 15 tahun 2006 tentang badan pemeriksa keuangan.

23E undang-undang dasar republik Indonesia tahun 1945.

LAMPIRAN

 **BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN**
Jalan Tamalanrea Raya No. 3 Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Makassar
Telepon (0411) 590591, 590592 Faksimile (0411) 590595
Email sulsel@bpkp.go.id

Nomor : S-2556/PW21/1/2020
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

13 Oktober 2020

Yth. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
di Makassar



Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 238/UN4.5.3/PT.00/2020 tanggal 07 Oktober 2020, hal sebagaimana pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa kami dapat memberikan izin untuk melaksanakan Penelitian di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan kepada :

Nama : Agus Mansyur
N I M : B.11116001
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Pelaksanaan Fungsi dan Tugas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Penelitian dilaksanakan mulai tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020.

Untuk koordinasi dan pelaksanaan teknis, dapat berkoordinasi lebih lanjut dengan Kepala Sub Bagian Kepegawaian.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik , kami ucapkan terima kasih.


Kepala Perwakilan
Kepala Bagian Tata Usaha

Risparanto
NIP 19700626 199103 1001